



In partnership with
Canada



Potensi Pendanaan Inovatif Untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim melalui Pengelolaan Lahan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, NTT

Penulis: Beria Leimona, Ni Putu Sekar Trisnaning Laksemi

1 Latar Belakang

"Climate change has the most extreme impact on vulnerable communities, especially people whose livelihoods depend on land and natural resources."
IPCC Sixth Assessment Report Impact, Adaptation, and Vulnerability (2022)

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem dan bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Tercatat peningkatan suhu telah mencapai 0.45-0.75 derajat Celsius yang berakibat pada peningkatan permukaan laut hingga 0.8-1,2 cm/tahun. Hal ini mengakibatkan dampak yang beragam pada berbagai sektor mulai dari potensi kerugian ekonomi, kelangkaan air, kerentanan penghidupan masyarakat, maupun kerentanan pangan.

Sebagai negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten dalam upaya pengendalian perubahan iklim, Indonesia telah Menyusun berbagai kebijakan dan program baik dalam kerangka kerja mitigasi maupun adaptasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim di berbagai sektor. Dalam upaya pelaksanaan aksi mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim diperlukan dukungan pendanaan yang tidak sedikit. Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada pendanaan APBN. Mengacu pada Indonesia Third Biennial Update Report 2021, kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC mencapai 4.002 triliun rupiah hingga 2030. Sementara rata-rata alokasi anggaran dalam APBN dalam kurun waktu 2020-2022 untuk aksi perubahan iklim sekitar 37,9 triliun (Publikasi Ditjen Anggaran, Kemenkeu, 24/4/2022). Hal ini memperlihatkan terdapat kesenjangan anggaran yang cukup besar untuk pendanaan aksi perubahan iklim. Kesenjangan serupa juga diamati dalam pelaksanaan aksi perubahan iklim di tingkat daerah. Oleh karena itu, pendanaan berbagai aksi perubahan iklim perlu memanfaatkan berbagai potensi pendanaan alternatif baik yang berasal dari pendanaan publik, privat, pendanaan masyarakat, bantuan internasional, dan berbagai jenis skema pendanaan. Poster ini menjabarkan potensi pendanaan inovatif untuk aksi perubahan iklim di tiga provinsi contoh yaitu Provinsi Sumatera Sealtan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Sektor	Program	Kebutuhan pendanaan (miliar rupiah)
Kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU)	Penurunan deforestasi dan degradasi lahan mineral	298.989
	Pengelolaan hutan lestari	
	Rehabilitasi lahan dengan dan tanpa rotasi	
	Pembangunan hutan tanaman industri	10.020
	Penurunan deforestasi dan degradasi lahan gambut	
Energi dan transportasi	Restorasi gambut	3.500.000
	Pembangkit energi terbarukan	
	Energi terbarukan non-electric	
	Pembangkit listrik tenaga batu bara rendah karbon	
	Jaringan gas kota dan konversi ke LPG	
Pertanian	Konservasi energi	7.229,39
	Penggunaan varietas padi rendah emisi	
	Penggunaan sistem irigasi yang efisien	
	Biogas	
	Perbaikan suplemen pakan ternak	
IPPU	Instalasi fasilitasi co-processing untuk mengurangi clinker/cement rasio	925
	Konstruksi pabrik dengan teknologi terbaru	
	Substitusi teknologi	
	Perbaikan sistem produksi	
	Instalasi Secondary N2O Abatement Catalyst	
Sampah dan limbah	Pengumpulan dan transportasi	185.273
	Pengolahan akhir	
Total		4.002.436

Sumber: Indonesia Third Biennial Update Report (2021)

2 Mengenal pendanaan inovatif

Pendanaan

Cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, ataupun proyek.

VS

Pembiayaan

Pemberian pinjaman dengan menerapkan jangka waktu tertentu untuk pengembalian atau pembagian hasil.

Pembiayaan/pendanaan inovatif

- Inisiatif untuk mengumpulkan dana baru
- Mengoptimalkan penggunaan sumber pendanaan tradisional.
- Memobilisasi sumber daya tambahan untuk pembangunan berkelanjutan/mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dengan mengatasi kegagalan pasar tertentu (contoh: jasa lingkungan) dan hambatan kelembagaan (contoh: kelembagaan perhutanan sosial, MSME).

Gambaran umum permasalahan

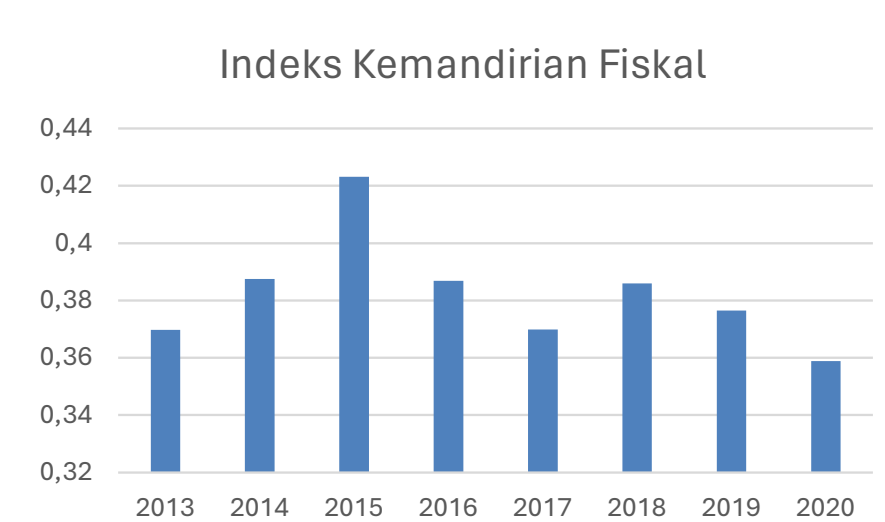
Skema Pendanaan	Sumber	Pro	Kontra
Result-based payment (GCF Readiness) Pengelolaan keuangan publik	Publik	• Pendanaan sudah pasti dan sumber dana sudah tersedia • Sosialisasi dan penguatan kapasitas sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat • Aturan dan dokumen sudah tersedia	• Birokrasi dan proses administrasi cukup panjang (tahapan penunjukan dinas terkait di daerah, pemilihan lembaga) • Rantai penyaluran ke kelompok masyarakat cukup panjang
Dana Desa/Village Fund Pengelolaan keuangan publik	Publik	• Pendanaan sudah pasti dan sumber dana sudah tersedia • Sosialisasi dan penguatan kapasitas sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat • Aturan dan dokumen sudah tersedia	• Perlu fasilitasi mendalam dan intensif, serta tepat waktu (Musrembangdes) • Perlu meyakinkan pemangku kebijakan desa agar memprioritaskan visi misi adaptasi dan mitigasi iklim.
Impact investor & social enterprise Pasar dan bisnis – Grant	Swasta	• Financial returns bisa lebih besar • Menawarkan cakupan lintas sektor dengan cakupan yang luas • Melibatkan perhitungan dampak sosial dan lingkungan	• Resiko yang tinggi jika ada perubahan regulasi dan tumpang tindih regulasi • Penilaian social and environmental impact mungkin akan menjadi tantangan
Program Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial Perusahaan (TJSL/CSR) Pasar dan bisnis	Swasta	• Jalur birokrasi cukup pendek • Dapat langsung diakses oleh kelompok masyarakat	• Perlu proses komunikasi, negosiasi, dan proses mendapatkan kepercayaan dari sektor swasta • Kehati-hatian dalam menyeimbangkan kepentingan pihak swasta dan masyarakat, termasuk proyek
Pinjaman bank (swasta, pemerintah nasional dan daerah) Investasi berbasis pengembalian	Publik-Swasta	• Keterbukaan perbankan dalam membantu akses perbankan untuk masyarakat • Cakupan pembiayaan cukup luas dan menasar komoditas pertanian daerah (termasuk sumber air).	• Prasyarat yang kompleks: jaminan, jenis komoditas, lokasi, legalitas usaha • Norma masyarakat/aturan agama: isu riba, anti hutang

Sumatera Selatan

Kapasitas fiskal daerah

Tahun	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori
2023	1.832	Sedang
2022	1.89	Sedang
2021	0.95	Tinggi
2020	0.98	Tinggi
2019	0.794	Sedang
2018	1.117	Tinggi
2017	1.16	Tinggi
2016	0.39	Rendah
2015	0.34	Rendah

Indeks Kemandirian Daerah



Status kemandirian fiskal 2020: Menuju Kemandirian

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan.

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan dan program pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk pemerintah pusat.

Potensi pendanaan inovatif untuk perubahan iklim

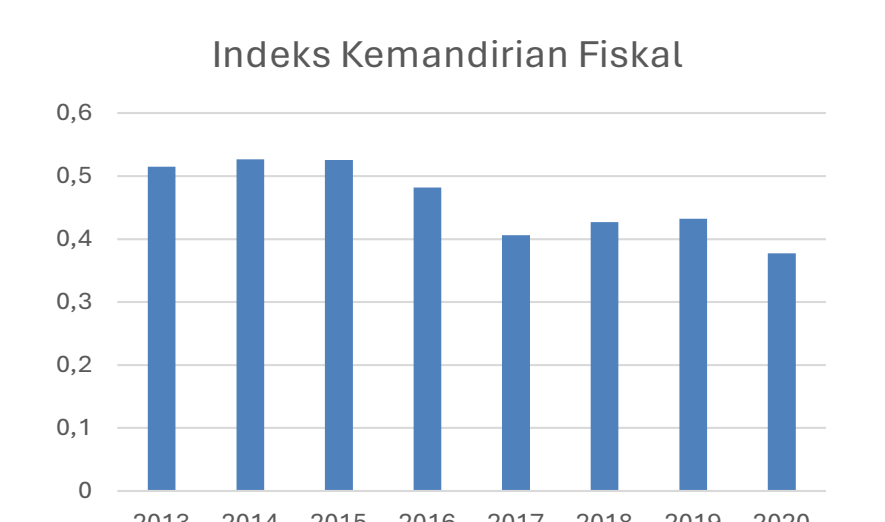
Skema pendanaan	Sumber	Pemangku kepentingan terkait	Kelompok target	Skala implementasi	Strategi implementasi
Impact investor & social enterprise Pasar dan bisnis – Grant	Swasta	Dinas Kehutanan, Bappeda, KPH, DPMD, Universitas, NGO setempat	Kelompok Perhutanan Sosial, KPH	Plot, lanskap	• Membangun skema yang efisien (alokasi efisien pendanaan ke kelompok masyarakat) dan selaras dengan regulasi nasional dengan stakeholder terkait • Mengetahui detail proses dan kebutuhan yang dibutuhkan • Peningkatan kapasitas para pihak dan membangun skema monitoring dan evaluasi kinerja
Result-based payment (GCF Readiness) Pengelolaan keuangan publik	Publik	Dinas Kehutanan, Bappeda, DLHP, KPH, UPT KLHK, DPMD, NGO	KPH, desa proklam, kelompok Masyarakat	Jurisdiksi, lanskap, plot	• Pelaksanaan feasibility study • Pendampingan penyusunan concept note berdasarkan hasil kajian L4L • Pemetaan target lokasi dan kelompok masyarakat yang mendapat berbagai sumber pendanaan • Peningkatan kapasitas para pihak termasuk kelompok masyarakat target terkait MRV, benefit sharing, dan safeguard • Penguatan kelembagaan
Program Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial Perusahaan (TJSL/CSR) Pasar dan bisnis	Swasta	Perusahaan, Forum TJSL/CSR, Bappeda	Kelompok tandi, kelompok tandi hutan, kelompok, wanita tandi, UMKM, desa	Plot	• Peningkatan pemahaman terkait penggunaan dana TJSL untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Membangun pendekatan TJSL berbasis kinerja • Membangun skema monitoring, evaluasi, dan pemberian penghargaan berbasis kinerja • Pengukuran dampak kegiatan TJSL terhadap indikator kelestarian lingkungan • Fasilitasi petani terkait di desa/sub-lanskap L4L (sinergi dengan kegiatan • Peningkatan kapasitas kelembagaan Forum

Sulawesi Selatan

Kapasitas fiskal daerah

Tahun	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori
2023	1.545	Rendah
2022	1.511	Rendah
2021	0.79	Sedang
2020	0.799	Sedang
2019	0.691	Sedang
2018	0.696	Sedang
2017	0.68	Sedang
2016	0.35	Rendah
2015	0.32	Rendah

Indeks Kemandirian Daerah



Status kemandirian fiskal 2020: Menuju Kemandirian

Potensi pendanaan inovatif untuk perubahan iklim

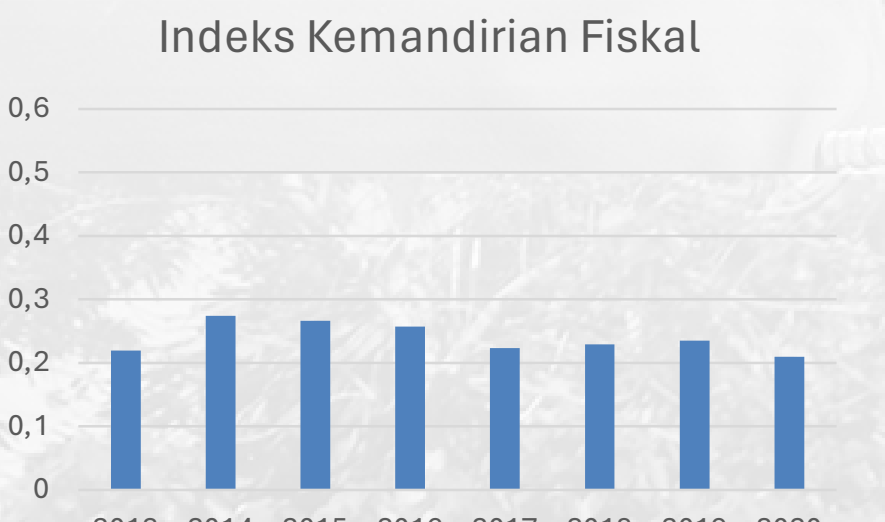
Skema pendanaan	Sumber	Pemangku kepentingan terkait	Kelompok target	Skala implementasi	Strategi implementasi
Result-based payment (GCF Readiness) Pengelolaan keuangan publik	Publik	DLHK, Bappeda, UPT KLHK, KPH, DPMD, NGO	KPH, desa proklam, desa hulu DAS, Kelompok Perhutanan Sosial	Jurisdiksi, lanskap, plot	• Pendampingan penyusunan concept note berdasarkan hasil kajian L4L • Integrasi dokumen perencanaan di Tingkat lanskap (e.g. RPDAS) maupun jurisdiksi (e.g. RPJMD) dengan rencana pendanaan • Pemetaan target lokasi dan kelompok masyarakat yang mendapat berbagai sumber pendanaan • Peningkatan kapasitas para pihak termasuk kelompok masyarakat target terkait MRV, benefit sharing, dan safeguard • Penguatan kelembagaan dan kerja sama dengan mitra terkait
Transfer anggaran berbasis ekologi Pengelolaan keuangan publik	Swasta	Bappeda, DLHK, DLH Kabupaten, Bappeda Kabupaten, DPMD	Kabupaten, desa	Jurisdiksi	• Peningkatan pemahaman terkait pengelolaan keuangan public untuk transfer anggaran berbasis ekologi • Peningkatan kapasitas dalam penyusunan transfer anggaran yang sesuai dengan isu strategis daerah dan berbasis kinerja • Penyusunan skema monitoring dan evaluasi berbasis kinerja • Pendampingan di tingkat desa untuk peningkatan kapasitas Masyarakat dalam perencanaan dan pengalokasian dana
Pembayaran jasa lingkungan Pasar dan bisnis	Swasta, masyarakat	Perusahaan pemanfaat air, desa, kelompok Masyarakat	Desa di hulu DAS, kelompok Masyarakat	Lanskap, plot	• Pemetaan dan kajian hidrologi dan mata air • Pemetaan tata guna lahan di area DAS • Pendampingan Masyarakat untuk pengelolaan lahan dan air berkelanjutan • Pendampingan penetapan biaya, penyusunan kriteria monitoring, dan penyusunan perjanjian kerja sama

Nusa Tenggara Timur

Kapasitas fiskal daerah

Tahun	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori
2023	1.505	Rendah
2022	1.47	Rendah
2021	0.454	Rendah
2020	0.786	Sedang
2019	0.275	Rendah
2018	0.397	Rendah
2017	0.39	Rendah
2016	0.16	Rendah
2015	0.12	Rendah

Indeks Kemandirian Daerah



Status kemandirian fiskal 2020: Menuju Kemandirian

Potensi pendanaan inovatif untuk perubahan iklim

Skema pendanaan	Sumber	Pemangku kepentingan terkait	Kelompok target	Skala implementasi	Strategi implementasi
Result-based payment (GCF Readiness) Pengelolaan keuangan publik	Publik	DLHK, Bappeda, UPT KLHK, KPH, DPMD, NGO	KPH, desa proklam, desa hulu DAS, Kelompok Perhutanan Sosial	Jurisdiksi, lanskap, plot	• Pendampingan penyusunan concept note berdasarkan hasil kajian L4L • Integrasi dokumen perencanaan di Tingkat lanskap (e.g. RPDAS) maupun jurisdiksi (e.g. RPJMD) dengan rencana pendanaan • Pemetaan target lokasi dan kelompok masyarakat yang mendapat berbagai sumber pendanaan • Peningkatan kapasitas para pihak termasuk kelompok masyarakat target terkait MRV, benefit sharing, dan safeguard • Penguatan kelembagaan dan kerja sama dengan mitra terkait
Transfer anggaran berbasis ekologi Pengelolaan keuangan publik	Swasta	Bappeda, DLHK, DLH Kabupaten, Bappeda Kabupaten, DPMD	Desa di hulu DAS, kelompok Masyarakat	Lanskap, plot	• Pemetaan dan kajian hidrologi dan mata air • Pemetaan tata guna lahan di area DAS • Kajian kebijakan dan perencanaan daerah • Pendampingan Masyarakat untuk pengelolaan lahan dan air berkelanjutan • Pendampingan penetapan biaya, penyusunan kriteria monitoring, dan penyusunan perjanjian kerja sama
Pembayaran jasa lingkungan Pasar dan bisnis	Swasta, masyarakat	Perusahaan pemanfaat air, desa, kelompok Masyarakat	Masyarakat yang belum memiliki akses air tetap	Plot	• Pemetaan dan kajian hidrologi dan mata air • Inventarisasi program pemerintah, Perusahaan, maupun inisiatif serupa untuk peningkatan akses air • Pendampingan masyarakat terkait penguatan kelembagaan, pengelolaan air, dan pengelolaan keuangan

Bentang lahan berkelanjutan untuk penghidupan berketahanan iklim di Indonesia

#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id